

Mengkontruksi Realitas Ekonomi : Framing Media tentang Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia

Constructing Economic Reality: Media Framing of the Value Added Tax Increase in Indonesia

Pramudita Budi Rahayu¹, Syamsuddin Aziz², Muhammad Akbar³

Universitas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10 Makassar,

Korespondensi: rahayupb23e@student.unhas.ac.id

Abstract

This article examines how the media frames news coverage of the increase in Value Added Tax (VAT) to 12 percent in Indonesia and its impact on public perceptions of economic inequality. This article uses Entman's framing analysis approach. The results of the analysis show that there are four elements of Entman's framing related to the issue of reporting on the VAT increase in Indonesia. These elements are the problem definition expressed by Kompas.com, which is that the VAT increase to 12 percent will weaken people's purchasing power, and the diagnosis of the cause expressed by Kompas.com, which is that the VAT increase to 12 percent is to maintain the health of the State Budget (APBN). The moral judgment highlighted by Kompas.com through its reporting on the comparison of VAT in other countries, especially ASEAN countries, with VAT in Indonesia. The treatment recommendation covered by Kompas.com is the solution to the 12 percent VAT increase announced by the government with its social assistance (BANSOS) and recommendations from non-governmental organizations to use other strategies to increase revenue besides raising VAT, such as eradicating corruption and optimizing other tax sources such as carbon tax.

Keywords: *media narrative, economic inequality, framing, VAT*

Abstrak

Artikel ini mengkaji media membingkai pemberitaan tentang kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen di Indonesia dan dampaknya terhadap persepsi public mengenai ketimpangan ekonomi. Artikel ini menggunakan pendekatan analisis framing dari Entman. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada empat elemen framing Entman terkait isu pemberitaan kenaikan PPN di Indonesia Dimana elemen tersebut adalah *problem definition* yang diungkapkan oleh Kompas.com adalah kenaikan PPN menjadi 12 persen akan melemahkan daya beli Masyarakat selanjutnya *diagnose cause* yang diungkapkan oleh Kompas.com yaitu naiknya PPN menjadi 12 persen untuk menjaga Kesehatan anggaran Anggaran Belanja Negara (APBN). *Make moral judgement* yang disorot oleh Kompas.com melalui pemberitaan mengenai perbandingan PPN di Negara lain utamanya negara ASEAN dengan PPN yang ada di Indonesia. *Treatment recommendation* diliput oleh Kompas.com adalah Solusi mengenai kenaikan PPN 12 persen yang diungkapkan oleh pemerintah dengan bantuan sosialnya (BANSOS) dan rekomendasi dari non pemerintah dengan menggunakan strategi lain dalam meningkatkan anggaran pendapatan selain menaikkan PPN yaitu dengan memberantas korupsi dan mengoptimalkan sumber pajak lain seperti pajak karbon.

Kata Kunci: narasi media, ketimpangan ekonomi, framing, PPN

PENDAHULUAN

Pemberitaan media memainkan peran penting dalam membentuk persepsi public terhadap kebijakan ekonomi, termasuk kenaikan pajak. Di Indonesia Dimana struktur kepemilikan media didominasi oleh konglomerasi besar, framing isu kenaikan pajak terhadap berbagai kelompok sosial, terutama pekerja dan Masyarakat yang berpenghasilan rendah, serta memperkuat atau menantang wacana ketimpangan yang sudah ada. Konglomerasi media mengacu pada konsentrasi kepemilikan media oleh sejumlah Perusahaan besar yang seringkali juga memiliki keterlibatan dalam sektor bisnis lainnya. Menurut McChesney, konglomerasi media menghasilkan lanskap media yang lebih mengutamakan kepentingan ekonomi pemiliknya, yang seringkali selaras dengan agenda politik tertentu (McChesney, R. 2000).

Di Indonesia, konglomerasi telah menjadi fenomena yang signifikan sejak deregulasi industry media pada tahun 1990-an. Industry besar di Indonesia didominasi oleh kelompok media besar seperti Kompas Gramedia dan Media Grup. Media yang berada dibawah kepemilikan konglomerasi cenderung menonjolkan narasi yang menguntungkan elit bisnis atau politik yang memiliki keterkaitan dengan dengan pemiliknya (Sen, K., & Hill, D. 2000).

Konglomerasi media mempengaruhi framing isu isu ekonomi, seperti kebijakan pajak. Herman dan Chomsky melalui propaganda model menunjukkan bahwa media besar cenderung membingkai isu ekonomi dengan cara yang tidak merugikan kepentingan pemilik modal (Herman, E. S., & Chomsky, N. 2021). Dalam konteks pemberitaan pajak, ini dapat berarti penonjolan narasi yang menguntungkan kelompok elit dibandingkan dengan kelas menengah kebawah.

Ketimpangan ekonomi di Indonesia merupakan isu yang terus di framing oleh media konglomerasi, terutama dalam konteks kebijakan public seperti perpajakan. Kenaikan pajak sering kali dijadikan alat yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara, yang pada akhirnya bertujuan untuk mendukung Pembangunan dan mengurangi kesenjangan. Namun, respon Masyarakat terhadap kebijakan tersebut sering kali dipengaruhi oleh bagaimana isu ini dinarasikan oleh media massa. Ketimpangan itu terasa jelas Dimana Masyarakat dari kelas menengah dibebani dengan berlapis lapis kebijakan pajak seperti PPH, PPN dan pajak lainnya sementara kalangan atas mendapatkan berbagai pengampunan pajak (Tax Amnesty). Selain itu kalangan kelas atas melalui berbagai koleganya dapat melakukan berbagai macam cara untuk menghindari pajak. Penelitian oleh Soroka menunjukkan bahwa pemberitaan kebijakan pajak cenderung bias, baik dari segi isi maupun sumber yang digunakan (Soroka, S. N. 2002).

Dalam lanskap media Indonesia, konglomerasi telah menjadi fenomena yang semakin dominan. Konglomerasi media mengacu pada konsolidasi kepemilikan media oleh segelintir entitas atau individu yang memiliki pengaruh besar terhadap industry media. Fenomena ini mempengaruhi interdependensi dan keberagaman perspektif dalam pemberitaan. Media yang dimiliki oleh konglomerat seringkali mencerminkan kepentingan ekonomi dan politik pemiliknya yang dapat memengaruhi pembingkai isu isu public, termasuk isu kenaikan pajak (Herman, E. S., & Chomsky, N. 2021). namun, menurut Baker penyebaran kepemilikan dapat mengarah pada distribusi kekuasaan komunikatif yang lebih demokratis dan melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan media (Baker, E. 2006).

Pemberitaan mengenai Isu kenaikan pajak itu sendiri juga mencerminkan

kompleksitas hubungan antara kebijakan fiskal, dinamika politik, dan kepentingan ekonomi berbagai pihak. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa framing pemberitaan oleh media dapat memperkuat atau mengurangi kepercayaan Masyarakat terhadap pemerintah serta memengaruhi dukungan terhadap kebijakan yang diusulkan (Entman, R. 1993, Gamson, W., & Modigliani, A. 1989).

Salah satu media yang juga memberitakan isu kenaikan pajak di Indonesia adalah media Kompas. Secara historis Kompas didirikan oleh Jacob Oetama yang juga dikenal sebagai tokoh media dengan pendekatan moderat dan tergabung dalam manajemen KKG. Meskipun tidak dimiliki oleh elit politik maupun elit bisnis. Posisi KKG sebagai salah satu konglomerasi besar membuatnya secara alami memiliki akses dan hubungan dengan berbagai elit sosial dan ekonomi di Indonesia. Hal ini memungkinkan Kompas untuk tetap menjadi media independent dalam batas tertentu dan memiliki kekuatan komunikasi yang lebih besar (Bagdikian, B. H. 2014). Selain itu pemberitaan Kompas juga bisa saja terpengaruh karena hubungannya dengan para elit baik elit politik maupun elit ekonomi. Namun Pendekatannya yang terkenal dengan moderat membuatnya tetap menjadi salah satu media yang dipercaya di Indonesia.

Media dengan narasinya pada dasarnya memiliki peran penting dalam membentuk perspektif public terhadap kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan naiknya tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Dalam konteks isu kenaikan tarif kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen yang direncanakan oleh pemerintah, media menjadi arena perdebatan. Melalui pemberitaan media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membingkai isu tersebut dengan perspektif tertentu yang dapat mempengaruhi opini public. Ketika media dan narasinya menetapkan agenda

pemberitaan yang berfokus pada kepentingan Masyarakat dengan mengarahkan Masyarakat pada penekanan penekanan tertentu pada pemberitaannya maka media telah membantu Masyarakat dalam memahami isu tersebut (Happer, C., & Philo, G.2013). selain itu Kesehatan demokrasi juga didapatkan dari media yang memberikan informasi yang akurat bukan hanya berisikan entertainment (Moretti, A. 2010).

Media arus utama seperti Kompas menyajikan narasi yang beragam terkait kebijakan ini. Sebagai contoh Kompas dalam berita yang berjudul “Ekonom sebut Masyarakat tidak siap dan terbebani PPN naik jadi 12 persen” menyoroti kepada Masyarakat yang akan terkena dampak akan kenaikan PPN terhadap daya beli Masyarakat yang melemah. Berita tersebut mengutip pernyataan ekonom yang menilai bahwa kenaikan PPN akan memperburuk ketimpangan ekonomi, karena kelompok Masyarakat rentan akan lebih terdampak dibandingkan golongan Masyarakat kelas atas.

Kompas yang terkenal tidak pernah absen dengan isu isu sosial yang penting tidak luput pemberitaannya mengenai kenaikan pajak. Mulai dari pemberitaan wacana kenaikan pajak, juga pemberitaan yang menginformasikan kepada Masyarakat tentang apa itu pajak dan dampaknya dari berbagai aspek.

Artikel ini menyoroti cara media di Indonesia membingkai narasi kebijakan pajak dalam konteks ketimpangan ekonomi, sesuatu yang belum banyak dianalisis. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis narasi media besar seperti Kompas dalam pemberitaan tentang kenaikan pajak di Indonesia. Studi kasus ini akan mengkaji bagaimana pemberitaan media berkontribusi pada pembingkai isu kenaikan pajak, dengan focus pada dampaknya terhadap kelompok Masyarakat yang rentan. Pendahuluan mencakup latar belakang dan relevansi penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat, metode penelitian, termasuk

hipotesis (opsional) apabila diperlukan, temuan, kesimpulan, dan rekomendasi dari hasil penelitian.

METODOLOGI PENELITIAN

Teori agenda setting dan framing menjadi relevan dalam memahami hubungan antara pemberitaan media dan opini public terkait kebijakan pajak. Agenda setting Dimana dijelaskan oleh McCombs dan Shaw, menunjukkan bahwa media memiliki kekuatan untuk menentukan isu apa yang dianggap penting oleh Masyarakat (Guo, L., & Vargo, C. 2017). Sementara itu, teori framing, yang dikemukakan oleh Entman, menyoroti bagaimana media memilih sudut pandang tertentu dalam menyajikan isu, yang dapat mempengaruhi cara Masyarakat memaknai informasi tersebut (Sparrow, B. 2004).

Analisis data pada artikel ini menggunakan empat elemen utama framing dari Entman yaitu

1. *Problem Definition* (Pendefinisian Masalah)
Elemen ini merujuk pada bagaimana media mendefinisikan atau menyoroti sebuah isu penting. Pendefinisian masalah membentuk cara Masyarakat untuk memahami realitas dari suatu situasi. Pendefinisian masalah juga akan menentukan apakah isu tersebut akan mendapatkan perhatian serius dari public atau diabaikan.
2. *Causal Interpretation* (Interpretasi Sebab-Akibat)
Elemen ini berfokus pada siapa atau apa yang dianggap bertanggung jawab atas masalah yang terjadi. Media seringkali menonjolkan satu actor atau factor tertentu sebagai penyebab, baik secara langsung maupun tidak langsung. Interpretasi sebab akibat mempengaruhi siapa

yang dipersalahkan atau dipuji oleh public atas isu tertentu.

3. *Moral Evaluation* (Evaluasi Moral)

Elemen ini berkaitan dengan nilai nilai atau norma norma yang digunakan untuk menilai masalah yang sedang diberitakan. Evaluasi moral melibatkan pemberian makna normative terhadap isu atau actor yang terlibat. Evaluasi moral membantu Masyarakat memahami isu melalui lensa norma norma tertentu, yang pada akhirnya mempengaruhi opini dan sikap mereka.

4. *Treatment Recommendation* (Rekomendasi Penyelesaian)

Elemen ini mengacu pada Solusi yang diusulkan atau disiratkan oleh media untuk menyelesaikan masalah yang sedang diberitakan. Media dapat secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kebijakan public atau sikap Masyarakat melalui rekomendasi ini. Rekomendasi penyelesaian yang disoroti oleh media dapat mempengaruhi Tindakan pembuat kebijakan dan respons Masyarakat terhadap isu tersebut.

Artikel ini menganalisis sebanyak 50 berita yang dipublikasi oleh Kompas.com dalam rentang waktu November 2024 sampai Desember 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Artikel ini menganalisis berita berita yang di publikasikan oleh Kompas terkait isu kenaikan PPN dan bagaimana framing yang ditampilkan oleh Kompas melalui berita beritanya. Sebanyak 50 berita dianalisis dalam rentang waktu 14 November hingga 12 Desember yang kemudian dibuat tabulasi untuk mengidentifikasi berita yang memuat

elemen framing dari Entman yaitu table yang berisikan berita yang memuat pendefinisian masalah, table yang memuat berita diagnose masalah, table yang

memuat berita pertimbangan moral dan table yang memuat berita dengan unsur rekomendasi masalah.

Tabel 1
Daftar Judul Berita Isu Kenaikan PPN

No	Tanggal	Judul Berita	Narasumber Berita	Penulis Berita
1	14/11/2024	PPN Naik Jadi 12 Persen, Sri Mulyani: APBN Harus Dijaga Kesehatannya	Menteri Keuangan Sri Mulyani	Muhammad Idris
2	14/11/2024	Sri Mulyani Pastikan Kenaikan Tarif PPN jadi 12 Persen Mulai 2025	Menteri Keuangan Sri Mulyani	Isna Rifka Sri Rahayu, Aprillia Ika
3	14/11/2024	Sri Mulyani Tetap Berlakukannya PPN 12 Persen Mulai Januari 2025	Menteri Keuangan Sri Mulyani	Muhammad Idris
4	14/11/2024	Ini Daftar Barang Yang Terdampak dan Tidak Terdampak PPN 12 Persen	Antara	Muhammad Idris
5	16/11/2024	Naik Jadi 12 Persen, Pajak PPN RI Tertinggi di ASEAN bareng Filipina	Worldwide Tax Summaries	Muhammad Idris
6	15/11/2024	PPN Tetap Naik Jadi 12 Persen, Mulai 1 Januari 2025, Apa Alasannya?	Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto	Yefta Christopherus Asia Sanjaya, Mahardini Nur Afifah
7	16/11/2024	Apa Itu PPN Yang Bakal Naik Jadi 12 Persen Mulai 1 Januari 2025	Menteri Keuangan Sri Mulyani	Chella Deva Anjelina, Rizal Setyo Nugroho
8	16/11/2024	Ekonom Sebut Masyarakat Tidak Siap Dan Terbebani PPN Naik Jadi 12 Persen	Econom Center And Law Studies Nailul Huda	Yefta Christopherus Asia Sanjaya
9	16/11/2024	Saat Pemerintah Targetkan Harga Tiket Pesawat Turun, Tapi Bakal Naik Imbas PPN 12 Persen	Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra	Yefta Christopherus Asia Sanjaya

10	18/11/2024	Ramai Ramai Ajakan 'Frugal Living' dan Kurangi Belanja Untuk Memprotes PPN 12 Persen, Apa Dampaknya?	Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira	Erwina Rachmi Puspa Pertiwi, Ahmad Naufal Dzulfaroh
11	18/11/2024	PPN 12 Persen : Ancaman Baru Bagi Pertumbuhan Ekonomi	Dosen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar Mohammad Aliman Shami	kompas
12	18/11/2024	Kenaikan PPN Bakal Jadi Pukulan Bagi Masyarakat Kelas Bawah	Analisis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita	Isna Rifka Sri Rahayu
13	19/11/2024	Pimpinan DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Kenaikan PPN 12 Persen	Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco	Tatang Guritno, Ihsanuddin
14	19/11/2024	PPN Singapura 9 Persen: Lebih Rendah Dari Indonesia, Fokus Untuk Kesejahteraan Warga	Straits Times	Yefta Christopherus Asia Sanjaya
15	19/11/2024	PPN Naik Jadi 12 Persen, Apa Dampaknya Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha		Muhammad Zaenuddin
16	19/11/2024	Kenaikan PPN 12 Persen Dinilai Akan Menghambat Pengentasan Kemiskinan	Pengamat Politik Pieter C Zulkifli	Ihsanuddin
17	19/11/2024	Menanti Campur Tangan Presiden Batalkan PPN 12 Persen	Pekerja Kreatif dan Pelaku UMKM Wahyu Lilik	Kompas
18	19/11/2024	Ramai Seruan Boikot Pemerintah, Imbas PPN 12 Persen, Ini Kata Kemenkeu	Kemenkeu	Isna Rifka Sri Rahayu, Sakina Rakhma Diah Setiawan
19	19/11/2024	Imbas PPN Naik 12 Persen, Peritel Was Was Masyarakat Boikot Beli Barang	Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budiharjo Iduansjah	Nirmala Maulana Achmad, Aprillia Ika
20	21/11/2024	Ramai Soal Petisi Tolak PPN 12 Persen Mulai 1 Januari 2025, Ini Kata Kemenkeu	Akun Bareng Warga, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni	Aditya Priatna Darmawan, Rizal Setyo Nugroho

Surjantoro

21	21/11/2024	Pemerintah Diminta Pikirkan UMKM Sebelum Naikkan PPN 12 Persen	Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty	Tatang Guritno, Dani Prabowo
22	21/11/2024	PPN 12 Persen Berlaku 2025, Daya Beli Kelas Menengah Bawah Terancam	Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro	Agustinus Rangga Respati, Aprillia Ika
23	21/11/2024	Realitas Ketimpangan: Indonesia Butuh Pajak Kekayaan, Bukan PPN 12 Persen	Peneliti Lepas dan Peneliti Rudi Hartono	kompas
24	21/11/2024	Respon Buruh Jika Pemerintah Terapkan PPN 12 Persen, Tapi Tak Naikkan Upah Minimum	Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal	Dian Erika Nugraheny, Ika Aprillia
25	22/11/2024	PPN 12 Persen Diprotes, Ditjen Pajak: Hasilnya akan Kembali ke Rakyat	DJP Kemenkeu	Isna Rifka Sri Rahayu, Erlangga Djumena
26	23/11/2024	Kemnekeu : PPN 12 Persen Turut Danai Bansos dan Subsidi Untuk Rakyat		Alicia Diahwahyuningtyas. Mahardini Nur Afifah
27	24/11/2024	Alternatif Penguatan APBN Tanpa Kenaikan PPN Jadi 12 Persen, Simak Saran PKB	Ketua DPP PKB Dita Indah Sari	Tatang Guritno, Amir Sadikin
28	24/11/2024	Deretan Negara Yang Tidak Memberlakukan PPN ke Warganya, Mana Saja	Global VAT Compliance	Erwina Rachmi Puspa Pertiwi, Rizal Setyo Nugraha
29	25/11/2024	PPN 12 Persen : Tambahan Pendapatan Sebanding Dengan Resiko?	Millenial, Pengusaha dan Mahasiswa Doktoral Universitas Diponegoro Andreas Renard Widarto	Kompas
30	26/11/2024	Penerapan PPN 12 Persen dan Keadilan Pajak	Sekjen PKB Hasanuddin Wahid	Kompas
31	26/11/2024	Cak Imin Ungkap Rencana Pemerintah Beri Bansos Untuk Warga Terdampak PPN 12 Persen	Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaminin Iskandar	Dian Erika Nugraheny, Sakina Rakhma Diah Setiawan

32	26/11/2024	Pengusaha Angkutan Sungai Keluhkan Kenaikan PPN 12 Persen	Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (Gapasdap) Rachmatika Ardiyanto	Elsa Catriana, Rakhma Diah Setiawan
33	27/11/2024	Luhut Sebut Kenaikan Tarif PPN 12 Persen Berpotensi Diunder	Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan	Rully R Raml1. Aprillia Ika
34	27/11/2024	Apindo Akan Bertemu Kemenkeu, Usul Penundaan Kenaikan PPN 12 Persen	Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)	Dian Erika Nugraheny, Aprillia Ika
35	27/11/2024	Kenaikan PPN Tak Mendadak, Ditjen Pajak Klaim Telah Sosialisasi dan Edukasi Sejak 2021	Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan	Isna Rifka Sri Rahayu, Sakina Rakhma Diah Setiawan
36	28/11/2024	Pemerintah Rencanakan Bansos Untuk Redam Dampak PPN 12 Persen, Ekonom: Hanya Bersifat Temporer	Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira	Isna Rifka Sri Rahayu, Erlangga Djumena
37	28/11/2024	Cak Imin Sebut Tak Ada Bansos Untuk Masyarakat Terdampak Kenaikan PPN	Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaminin Iskandar	Nicholas Ryan Aditya, Arditho Ramadhan
38	28/11/2024	Alih Alih Bansos Untuk Redam Dampak PPN 12 Persen, Ekonom Sarankan Ini	Ekonom	Isna Rifka Sri Rahayu, Sakina Rakhma Diah Setiawan
39	29/11/2024	Kenaikan PPN Belum Pasti, Istana : Masih dihitung	Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi	Fika Nurul Ulya, Ihsanuddin
40	05/12/2024	PPN 12 Persen Tetap Berlaku 1 Januari 2025, Tapi Bukan Untuk Masyarakat Kecil	Ketua Komisi XI DPR Misbakhun	Adhyasta Dirgantara, Ihsanuddin
41	05/12/2024	PPN 11 Persen Tetap Berlaku Untuk Rakyat Kecil, PPN 12 Persen Hanya Untuk Barang Mewah	Ketua Komisi XI DPR Misbakhun	Adhyasta Dirgantara, Ihsanuddin
42	05/12/2024	DPR Minta Pajak Barang Kebutuhan Pokok Turun, Prabowo Janji Pertimbangkan	Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal	Adhyasta Dirgantara, Ihsanuddin

43	06/12/2024	Ekonom Nilai Kebijakan Selektif PPN Berpotensi Menimbulkan Kebingungan	Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira	Sakina Rakhma Diah Setiawan
44	06/12/2024	PPN 12 Persen Akan Berlaku Untuk Barang Mewah, Ekonom Lebih Baik Ditunda	Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin	Sakina Rakhma Diah Setiawan
45	06/12/2024	Bos TMMIM Khawatir Industri Otomotif Terperosok Jika PPN 12 Persen Diterapkan	Wakil Presiden PT Toyota Motor Manufakturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam	Elsa Catriana, Rakhma Diah Setiawan
46	06/12/2024	Airlangga Sebut Kebijakan PPN 12 Persen Difinalisasi Minggu Depan	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto	Muhammad Idris
47	07/12/2024	Kenaikan PPN Barang Mewah Jadi 12 Persen, Budiman Sudjatmiko : Tidak Akan Membuat Orang Miskin	Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko	Dian Erika Nugraheny, Aprillia Ika
48	07/12/2024	PPN Naik untuk Barang Mewah, Pengusaha : Utamakan Perlindungan Kelas Bawah	Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman	Rully R Ramli. Aprillia Ika
49	08/12/2024	Said Abdullah : Pemerintah Perlu Siapkan Mitigasi Komprehensif Dampak Kenaikan PPN 12 Persen	Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah	Hotria Mariana, A P Sari
50	12/12/2024	Paradoks Kenaikan Pajak 12 Persen	Pengamat Perlindungan Konsumen dan Pelayanan Publik	Kompas

Sumber : Olah data penulis 2024

Tabel 2 Pendefenisian Masalah

Tanggal Berita	Judul Berita	Teks Berita
16/11/2024	Ekonom Sebut Masyarakat Tidak Siap Dan Terbebani PPN Naik Jadi 12 Persen	selama ini daya beli tergerus karena ada kebijakan kebijakan pemerintah yang mengurangi pendapatan disposibel masyarakat. Adapun pendapatan disposibel adalah jumlah uang yang tersisa setelah dipotong pajak dari pendapatan total seseorang

18/11/2024	Kenaikan PPN Bakal Jadi Pukulan Bagi Masyarakat Kelas Bawah	Ketika PPN menjadi 12 persen akan membuat hampir semua barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat menjadi lebih mahal. Faktanya saat ini daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih dan jika kenaikan PPN dipaksakan akan mempengaruhi banyak hal.
18/11/2024	PPN 12 Persen : Ancaman Baru Bagi Pertumbuhan Ekonom	Ditengah daya beli masyarakat yang masih rapuh, kebijakan ini terasa seperti beban tambahan yang menyedihkan. Dampaknya tidak hanya menciptakan ketegangan pada dompet masyarakat, tetapi juga menggerogoti roda ekonomi. Daya beli melemah, konsumsi menurun, dan dunia bisnis mulai kehilangan pasar
19/11/2024	Kenaikan PPN 12 Persen Dinilai Akan Menghambat Pengentasan Kemiskinan	"saat daya beli melemah, sulit membayangkan target penghapusan kemiskinan dapat tercapai. Dalam situasi seperti ini, kebijakan fiskal yang tidak pro rakyat justru memperburuk ketimpangan ekonomi. Dengan konsumsi domestik sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi, peningkatan beban pajak beresiko meruntuhkan fondasi tersebut"
19/11/2024	PPN Naik Jadi 12 Persen, Apa Dampaknya Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha	Ketika PPN menjadi 12 persen akan membuat hampir semua barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat menjadi lebih mahal. Faktanya saat ini daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih dan jika kenaikan PPN dipaksakan akan mempengaruhi banyak hal. Daya beli masyarakat yang lesu itu telah berdampak pada turunnya permintaan dan penjualan berbagai sektor usaha
21/11/2024	PPN 12 Persen Berlaku 2025, Daya Beli Kelas Menengah Bawah Terancam	impact dari kenaikan PPN itu memang perlu dilihat dari segmen middle to lower. Lebih lanjut Asmo menuturkan penerapan kebijakan PPN 12 Persen tahun depan dapat memunculkan efek inflasi yang lebih besar terhadap segmen menengah ke bawah

Sumber: olah data penulis 2024

Melalui table 2 yang berisi berita-berita yang memuat elemen pendefinisian masalah terkait isu kenaikan PPN yang dipublikasikan oleh Kompas.com. Media online tersebut mendefinisikan masalah diakibatkan oleh kenaikan PPN yang dikemukakan oleh berbagai sumber mulai dari ekonom, akademisi, generasi millennial dan pengusaha dengan pemikiran yang sama bahwa akan terjadi penurunan daya beli Masyarakat khususnya Masyarakat kelas menengah bawah dengan naiknya tarif PPN.

Daya beli Masyarakat sering disebut dalam sejumlah pemberitaan yang mencerminkan bahwa hal tersebutlah yang menjadi masalah bagi Masyarakat khususnya Masyarakat kelas menengah dan bawah dengan kenaikan PPN. Daya beli Masyarakat dinarasikan dengan kalimat daya beli Masyarakat masih rapuh, daya beli melemah, daya beli Masyarakat yang lesu. Narasi narasi tersebut dengan menggunakan kata-kata yang bermakna bahwa saat ini Masyarakat berada pada kondisi Dimana kemampuan Masyarakat untuk membeli barang dan jasa menurun

secara signifikan. Melalui narasi tersebut Kompas.com memframing bahwa kenaikan PPN akan berdampak pada Masyarakat kelas menengah khususnya daya beli Masyarakat dengan konotasi kata rapuh, lemah, dan lesu yang disandingkan dengan kalimat daya beli Masyarakat sehingga terbingkai makna kerentanan dan ketidakberdayaan.

Dampak akan melemahnya daya beli Masyarakat karena kenaikan PPN juga petisi untuk membatalkan kebijakan kenaikan PPN. Hal ini menambah kekhawatiran para pelaku usaha yang pada akhirnya juga akan berdampak pada ekonomi negara.

berdampak pada sektor yang lain seperti UMKM, industri otomotif, bahkan Peritel ikut terkena dampaknya akibat lemahnya daya beli Masyarakat. Terlebih lagi ada cuitan yang mendominasi di media sosial yang kemudian viral selama pemberitaan isu kenaikan PPN menjadi 12 persen yaitu seruan *Frugal Living* atau dikenal dengan gaya hidup hemat. Seruan seruan lain juga turut mewarnai media sosial seperti seruan boikot pemerintah dan pembuatan

Selanjutnya diagnose penyebab dari isu kenaikan PPN, berdasarkan pemberitaan oleh

Kompas.com akan dijelaskan pada table ke 3.

Tabel 3 Diagnosa Penyebab

Tanggal	Judul Beita	Teks Berita
14/11/2024	PPN Naik Jadi 12 Persen, Sri Mulyani: APBN Harus Dijaga Kesehatannya	Menteri keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemberlakuan PPN 12 Persen adalah demi kelangsungan APBN agar tetap sehat
14/11/2024	Sri Mulyani Tetap Berlakukan PPN 12 Persen Mulai Januari 2025	Dia mengungkapkan, tarif PPN 12 Persen bukan kebijakan yang diputuskan bukan tanpa pertimbangan. Kenaikan PPN diperlukan untuk menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
14/11/2024	Sri Mulyani Pastikan Kenaikan Tarif PPN jadi 12 Persen mulai 2025	"Tapi (penerapannya) dengan penjelasan yang baik, sehingga kita tetap bisa. Bukannya membabi buta, tapi APBN tetap harus dijaga kesehatannya. Namun, pada saat yang lain, APBN itu harus berfungsi dan mampu merespon dalam episode global financial crisis"

15/11/2024	PPN Tetap Naik Jadi 12 Persen, Mulai 1 Januari 2025, Apa Alasannya?	Airlangga menyampaikan ada beberapa alasan yang melatarbelakangi kenaikan ppn jadi 12 persen. Pertama, PPN naik menjadi 12 persen untuk mengdongkrak pendapatan negara. Kedua, pemerintah menaikkan PPN untuk mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. Alasan lain yang melatarbelakangi kenaikan PPN jadi 12 persen adalah Indonesia ingin menyesuaikan standar international
25/11/2024	PPN 12 Persen : Tambahan Pendapatan Sebanding Dengan Resiko?	Menteri Keuangan Sri Mulyani seperti dikutip Kompas.com, berdalih pemberlakuan tarif PPN menjadi 12 persen semata mata untuk menjaga kesehatan APBN mengantisipasi ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global

sumber : olah data penulis 2024

Melalui table 3 yang berisikan berita yang dipublikasikan oleh Kompas.com memuat elemen diagnosa masalah terkait isu kenaikan PPN. Melalui table diatas dapat diamati bahwa diagnosa masalah dari Kompas.com terkait naiknya PPN adalah untuk menjaga Kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Narasi ini menggunakan metafora dengan kalimat menjaga Kesehatan dengan kata Kesehatan itu sendiri untuk menunjukkan bahwa APBN itu seperti tubuh yang perlu dirawat dan dijaga agar tetap kuat dan bisa menjalankan fungsinya.

Diagnosa masalah yang dimuat pada Kompas.com hanya berisi satu sumber saja yaitu dari pihak pemerintah mulai dari Kementerian Keuangan yaitu Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto. Beberapa pemberitaan menekankan narasi menjaga Kesehatan APBN yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani namun narasi berita menjaga

Tabel 4 Membuat Pertimbangan Moral

Kesehatan APBN tidak disertai penjelasan apakah APBN Indonesia saat ini tidak baik baik saja sehingga perlu dijaga kesehatannya dengan menaikkan tarif PPN 12 persen.

Pemerintah hanya mengungkapkan bahwa kenaikan PPN 12 Persen sudah dipertimbangkan untuk menjaga Kesehatan APBN dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dan geopolitical global. Dari pemberitaan pemberitaan naiknya PPN 12 Persen Nampak bahwa Menteri keuangan bertekad untuk menaikkan tarif PPN 12 Persen walau banyak protes dari berbagai kalangan karena dampaknya bagi Masyarakat kelas menengah bawah. Hal tersebut ditekankan dalam pemberitaan bahwa APBN perlu dijaga kesehatannya dibeberapa judul berita.

Berikutnya adalah table 4 yang berisikan berita berita yang memuat elemen bagaimana pertimbangan moral oleh Kompas.com terkait isu kenaikan PPN 12 persen.

Tanggal	Judul Berita	Teks Berita
---------	--------------	-------------

16/11/2024	Naik Jadi 12 Persen, Pajak PPN RI Tertinggi di ASEAN bareng Filipina	Dengan tarif baru PPN 12 Persen, Indonesia menempati rangkin pertama bersama dengan Filipina, sebagai negara dengan tarif PPN tertinggi di regional Asia tenggara. Sebagai pembanding lain di kawasan Asia, Jepang menerapkan VAT sebesar 10 persen, Korea Selatan 10 persen, dan Australia 10 persen
18/11/2024	Ramai Ramai Ajakan 'Frugal Living' dan Kurangi Belanja Untuk Memprotes PPN 12 Persen, Apa Dampaknya?	Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen membuat sejumlah warganet menyerukan aksi boikot dengan menerapkan frugal living dan mengurangi belanja. Ajakan boikot tersebut menggema di media sosial X atau Twitter dalam beberapa hari terakhir
19/11/2024	PPN Singapura 9 Persen: Lebih Rendah Dari Indonesia, Fokus Untuk Kesejahteraan Warga	Wong mengatakan, kenaikan PPN di Singapura telah mempertimbangkan dengan cermat situasi secara keseluruhan, seperti pandemi covid 19, kondisi ekonomi dan prospek inflasi....besaran PPN 7 Persen yang berlaku 2022 tidak pernah berubah selama 15 tahun. Alasan pemerintah Singapura menaikkan PPN menjadi 9 persen juga sejalan dengan tingginya angka harapan hidup. pemerintah setempat menjalankan kebijakan yang pro-kesehatan dan kesejahteraan rakyat, mulai dari pajak yang tinggi untuk rokok dan minuman beralkohol, larangan merokok ditempat umum dll.
19/11/2024	Ramai Seruan Boikot Pemerintah, Imbas PPN 12 Persen, Ini Kata Kemenkeu	Ajakan memboikot pemerintah dengan mengerem konsumsi ramai diserukan di media sosial selama sepekan terakhir. "mau hukum pemerintah? Ga usah rame, ga usah demo, tahan aja duit lo. Klo banyak yang melakukan panik kok mereka". Terkait seruan boikot pemerintah itu, kepala biro komunikasi dan layanan informasi kemenkeu Deni Surjantoro enggan berkomentar
21/11/2024	Ramai Soal Petisi Tolak PPN 12 Persen Mulai 1 Januari 2025, Ini Kata Kemenkeu	petisi untuk menolak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) jadi 12 persen mulai 1 januari 2025, mulai menggema dan viral di media sosial. Petisi ini dilakukan secara online melalui laman change.org. merujuk pada laman change.org, petisi ini diadakan sejak Selasa (19/11/2024) yang diisianisasi oleh akun bareng warga. petisi ini membutuhkan setidaknya 5000 tanda tangan. sementara hingga Kamis (21/11/2024) siang, petisi tersebut sudah mendapatkan 3.176 tanda tangan.
21/11/2024	Realitas Ketimpangan: Indonesia Butuh Pajak Kekayaan, Bukan PPN 12 Persen	Politik perpajakan di negara kita memang tidak berkeadilan : kelas menengah dan kebawah ditumpuki berlapis lapis beban pajak, sementara si super kaya diberi pengampunan pajak. Seharusnya pajak menjadi instrumen untuk redistribusi kekayaan, sehingga ketimpangan ekonomi bisa mengecil. Pada kenyataannya politik pajak di Indonesia sangat tidak berkeadilan. selain itu, orang-orang kaya di Indonesia, dengan pengaruhnya yang luar biasa pada politik, selalu punya seribu satu celah untuk menghindari kewajiban pajak.

24/11/2024	Deretan Negara Yang Tidak Memberlakukan PPN ke Warganya, Mana Saja	Ada beberapa negara yang tidak memberlakukan PPN. Suatu negara yang tidak akan menerapkan PPN biasanya memperoleh pendapatan dari sumber lainnya. Pemerintah sejumlah negara menerapkan bebas tarif PPN untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dalam negerinya.
26/11/2024	Penerapan PPN 12 Persen dan Keadilan Pajak	sebagus apapun dasar pertimbangan dan tujuan penerapan PPN, yang menanggung beban dan dampaknya adalah masyarakat. Dalam jangka menengah dan panjang, pemerintah tak boleh terus membebani rakyat dengan kenaikan tarif pajak. Lebih baik mengadopsi kebijakan pajak mengacu ke konsep keadilan pajak. Jangka Panjang kita berharap pemerintah melakukan reformasi pajak secara luas, termasuk mempertimbangkan konsep "keadilan pajak" dengan menarik pajak yang besar secara proporsional kepada orang kaya dan pelaku underground economy
12/12/2024	Paradoks Kenaikan PPN 12 Persen	Kenaikan PPN menjadi 12 persen adalah kebijakan paradoks, baik dari sisi ekonomi, sosial, dan kebijakan publik. Apa musabanya, pertama mestinya pemerintah jangan menggunakan kacamata kuda dalam menerapkan suatu kebijakan, sekalipun hal itu adalah mandat suatu undang undang. Aspek paradoks kedua, jika memang pemerintah butuh banyak fulus untuk menjalankan program program besarnya, kenapa justru membatalkan kenaikan cukai rokok pada 2025? sisi paradoks ketiga, prosentase PPN di Indonesia menjadi tertinggi di ASEAN, setara dengan Singapura dan Filipina.

sumber : olah data penulis 2024

Table diatas melalui berita yang dipublikasikan menjabarkan bagaimana Kompas.com mempertimbangkan moral terkait isu kenaikan PPN, dalam penilaian moralnya terkait isu kenaikan PPN 12 persen Nampak memihak kepada rakyat Indonesia yang dianggap sebagai korban yang terkena dampak akan naiknya PPN menjadi 12 persen. Kompas.com banyak memberitakan dampak dampak yang akan diterima oleh Masyarakat menengah ke bawah yang dinyatakan oleh berbagai narasumber. Mulai dari ekonom yang menganggap PPN 12 persen ini akan menambah lemah perekonomian Masyarakat yang ditandai oleh daya beli Masyarakat yang melemah. Tak luput akademisi, generasi milenial dan pengusaha pun ikut beranggapan bahwa

kenaikan PPN 12 persen juga dinilai tidak adil bagi Masyarakat dan juga mempengaruhi daya beli Masyarakat.

Pertimbangan moral juga dinampakkan oleh Kompas.com melalui pemberitaan pemberitaan mengenai kebijakan pajak di negara lain terutama di negara negara tetangga Indonesia seperti Singapura dan negara negara Asia lainnya seperti Jepang dan Korea Selatan bahkan negara negara yang tidak memberlakukan pajak pertambahan nilai kepada Masyarakat. Kompas.com dengan framingnya menggambarkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan PPN tertinggi. Sementara negara tetangga Singapura membuat tarif PPN hanya 9 persen yang diperuntukkan untuk kesejahteraan Kesehatan masyarakatnya

dan kenaikan tersebut naik setelah 15 tahun tidak pernah naik. Sementara itu negara negara yang tidak memberlakukan pajak kepada masyarakatnya bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi internal dinegaranya dengan meningkatkan daya beli masyarakatnya. Negara negara lain seperti jepang dan korea Selatan menerapkan pajak tidak setinggi pajak yang diterapkan kedua negara tersebut. hal tersebut dikarenakan kedua negara tersebut lebih menekankan pajak pada sektor lain dan bukan pajak pertambahan nilai seperti di Indonesia.

Framing dengan pemberitaan pajak di negara lain dapat memberikan Masyarakat tambahan informasi dan mempengaruhi opini Masyarakat mengenai bagaimana kebijakan mengenai pajak dikelola dengan kebijaksanaan mungkin. Kompas.com membingkai kenaikan pajak sebagai sesuatu yang tidak

adil dengan membandingkan bagaimana pajak dikelola di negara negara tersebut yang dikelola untuk peningkatan pelayanan Kesehatan dan pelayanan public.

Table terakhir ialah table 5 yang berisi berita berita dengan elemen rekomendasi Solusi yang dipublish oleh Kompas.com

Tabel 5 Rekomendasi Solusi

Tanggal	Judul Berita	Teks Berita
19/11/2024	Pimpinan DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Kenaikan PPN 12 Persen	Cucun pun memberikan catatan mengapa kenaikan PPN perlu dipikirkan kembali. Pertama, PPN yang dikenakan pada transaksi jual beli barang kena pajak (BKP) dan/ jasa kena pajak (JKP) memiliki dampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Kedua, PPN merupakan pajak tidak langsung yang mengenakan beban pajak pada konsumen. ketiga, pemerintah juga harus memperhatikan kondisi psikologis masyarakat.
19/11/2024	Menanti Campur Tangan Presiden Batalkan PPN 12 Persen	Peran Presiden sangat krusial dalam memimpin. Ada banyak opsi untuk pemerintah, misalnya melakukan pemberantasan korupsi secara masif untuk memperbaiki pengelolaan APBN agar tidak bocor, memangkas anggaran tidak produktif, melakukan optimalisasi pajak lain, misalnya pajak karbon
21/11/2024	Pemerintah Diminta Pikirkan UMKM Sebelum Naikkan PPN 12 Persen	"UMKM beresiko mengalami penurunan penjualan yang signifikan mengakibatkan ketidakmampuan untuk mempertahankan arus kas dan keseimbangan keuangan usaha mereka". "pikirkan nasib jutaan UMKM yang akan terdampak, termasuk pekerja yang hidup dari sana"

22/11/2024	PPN 12 Persen Diprotes, Ditjen Pajak: Hasilnya akan Kembali ke Rakyat	Penerimaan negara dari pungutan PPN akan dikembalikan ke masyarakat melalui subsidi maupun program program bantuan untuk kelompok masyarakat yang membutuhkan. Ini ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat.
23/11/2024	Kemnekeu : PPN 12 Persen Turut Danai Bansos dan Subsidi Untuk Rakyat	Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), memastikan hasil penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen turut digunakan untuk mendanai program bantuan sosial (Bansos) dan subsidi untuk membantu kesejahteraan masyarakat.
24/11/2024	Alternatif Penguatan APBN Tanpa Kenaikan PPN Jadi 12 Persen, Simak Saran PKB	Dita memberikan sejumlah contoh konkret terkait alternatif yang dapat diambil. Pemerintah, kata dia, seharusnya mempertimbangkan untuk meningkatkan penerimaan negara melalui penyesuaian royalti dan bagi hasil dari produk tambang, terutama produk yang harganya stabil di pasar global. Disisi lain Dita mengingatkan akan pentingnya penegakan hukum untuk meminimalkan kebocoran anggaran.
26/11/2024	Cak Imin Ungkap Rencana Pemerintah Beri Bansos Untuk Warga Terdampak PPN 12 Persen	"Sampai hari ini, kategori kelas menengah dan rentan miskin itu harus diwaspadai. Nah, soal jenis dan polanya (bansos) misalnya berbagai keringanan keringanan yang harus diberikan on going process" ujar cak imin
27/11/2024	Apindo Akan Bertemu Kemenkeu, Usul Penundaan Kenaikan PPN 12 Persen	Shinta menjelaskan,pengusaha sudah sepakat untuk kenaikan PPN ditunda. Shinta juga menyatakan bahwa masyarakat tidak menghendaki kenaikan PPN
28/11/2024	Alih Alih Bansos Untuk Redam Dampak PPN 12 Persen, Ekonom Sarankan Ini	Sejumlah ekonom memiliki solusi lain untuk menghindari penurunan daya beli terutama masyarakat kelas menengah akibat kenaikan PPN dari 11 persen ke 12 persen yang akan diterapkan mulai 1 Januari 2025

28/11/2024	Pemerintah Rencanakan Bansos Untuk Redam Dampak PPN 12 Persen, Ekonom: Hanya Bersifat Temporer	Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai rencana ini bukan solusi yang tepat untuk meredam penurunan daya beli akibat PPN. "Tidak semua kelompok masyarakat yang terdampak kenaikan PPN, khususnya kelas menengah, mendapat kompensasi. hampir sulit ya jumlah kelas menengah yang disebut aspiring middle class saja ada 137,5 juta orang. Berapa banyak jumlah bansosnya juga belum jelas
05/12/2024	PPN 12 Persen Tetap Berlaku 1 Januari 2025, Tapi Bukan Untuk Masyarakat Kecil	Ketua Komisi XI DPR Misbakhun tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen akan tetap berlaku pada 1 januari 2025. Meski demikian, penerapan PPN 12 persen hanya menyasar barang mewah, sehingga dampaknya diclaim tak dirasakan oleh masyarakat kecil. Misbakhun mengatakan, barang kebutuhan pokok yang biasa diakses masyarakat kecil akan tetap dikenakan PPN sebesar 11 persen, bukan 12 persen
05/12/2024	DPR Minta Pajak Barang Kebutuhan Pokok Turun, Prabowo Janji Pertimbangkan	"mengenai usulan dari kawan kawan DPR bahwa ada penurunan pajak kepada kebutuhan kebutuhan pokok yang langsung menyentuh kepada masyarakat, bapak Presiden tadi menjawab bahwa akan dipertimbangkan dan dikaji". Disisi lain pertemuan Prabowo dengan pimpinan DPR itu juga menghasilkan keputusan bahwa kenaikan PPN 12 persen hanya akan berlaku untuk barang mewah
08/12/2024	Said Abdullah : Pemerintah Perlu Siapkan Mitigasi Komprehensif Dampak Kenaikan PPN 12 Persen	Untuk mengantisipasi dampak kenaikan PPN, Said mengusulkan 8 kebijakan mitigasi. Pertama penambahan anggaran perlindungan sosial. Kedua, mempertahankan subsidi bahan bakar. Ketiga, memperluas subsidi transportasi umum. Keempat, memberikan subsidi perumahan. kelima, memperkuat bantuan pendidikan. keenam, melakukan operasi pasar rutin. ketujuh, meningkatkan menggunakan produk UMKM. kedelapan, meluncurkan program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi.

Sumber olah data penulis 2024

Pada table diatas memuat berita berita dengan elemen rekomendasi Solusi atas naiknya PPN di Indonesia. Dari pemberitaan pemberitaan dapat dilihat bahwa rekomendasi Solusi dapat dilihat dari dua pihak yaitu pihak pemerintah dan non pemerintah.

1. Rekomendasi Solusi dari pemerintah

Pemberitaan mengenai isu kenaikan PPN 12 persen yang disoroti oleh Kompas.com tak luput memberitakan rekomendasi Solusi akan dampak yang ditimbulkan dari kenaikan PPN menjadi 12 persen. Solusi yang ditawarkan pemerintah yang bersumber dari Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah dengan memberikan bantuan sosial (Bansos) kepada Masyarakat yang terdampak akan kenaikan PPN. Bansos yang diberikan oleh pemerintah dapat berupa program program pemberdayaan Masyarakat seperti misalnya Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi listik, subsidi BBM dan program program lainnya.

Namun, bantuan dari pemerintah ini dianggap oleh ekonom sebagai Solusi yang tidak efektif karena sifat bantuan ini temporer dan tidak dapat dianggap dapat menaikkan daya beli Masyarakat dengan adanya bantuan bantuan maupun subsidi dari pemerintah mengingat anggaran yang diberikan untuk bansos terbatas dan penerima bansos yang banyak di Indonesia. Selain itu liputan Kompas.com terkait bansos kontra indikasi dengan berita yang bersumber dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau yang juga dikenal dengan Cak Imin Dimana tanggal 26/11/2024 mengungkapkan bahwa pemerintah berencana memberikan bansos untuk warga terdampak PPN 12 persen sementara ditanggal 28/11/2024 Kompas.com liputan Kompas.com memberitakan bahwa Cak Imin sebut bahwa tak ada bansos untuk Masyarakat terdampak PPN. Hal tersebut tentunya menimbulkan ketidakpastian bantuan kepada Masyarakat yang rentan.

2. Rekomendasi Solusi dari non pemerintah.

Rekomendasi Solusi lain datang dari ekonom, partai politik, akademisi, pengusaha

dan kalangan generasi milenial yang menganggap Solusi dari kenaikan PPN adalah dengan mempertimbangkan dan mengkaji Kembali kenaikan PPN atau menunda kenaikan PPN tersebut hingga daya beli Masyarakat pulih Kembali. Selain itu Solusi lain yang diberikan adalah dengan memperhatikan kondisi psikologis Masyarakat ditengah isu naiknya PPN sementara korupsi masih kerap terjadi di pemerintahan sehingga perlu pemberantasan korupsi yang massif agar tidak terjadi kebocoran anggaran. Solusi lain yang disarankan adalah dengan memangkas anggaran yang tidak produktif dan mengoptimalisasi pajak dari sektor lain seperti pajak karbon.

Solusi lainnya diberikan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menilai bahwa Solusi dari meningkatkan pendapatan negara bisa dilakukan tanpa menaikkan PPN yang dapat merugikan Masyarakat khususnya Masyarakat kelas menengah ke bawah. PKB memberikan saran Solusi dengan mempertimbangkan untuk meningkatkan pendapatan anggaran melalui penyesuaian royalty dan bagi hasil dari produk tambang.

Namun, menjelang tahun 2025 dimana PPN 12 akan diterapkan, tepatnya dibulan Desember Kembali Kompas.com menyoroti Solusi yang diberikan oleh pemerintah bahwa akan ada dua tarif PPN yaitu PPN 11 Persen dan PPN 12 persen. Dimana PPN 12 persen hanya menyasar pada barang mewah.

KESIMPULAN

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis framing atau pembingkaihan atas isu terkini yaitu kenaikan PPN menjadi 12 persen. Dapat dilihat melalui berita berita yang dimuat oleh Kompas.com sebagai media yang dipercaya oleh Masyarakat mencoba untuk netral dengan mengambil sumber berita baik dari pihak pemerintah maupun pihak non pemerintah. Kompas.com pun mengedukasi Masyarakat melalui beritanya mengenai siapa saja yang kena pajak dan barang dan sektor apa saja yang dikenai pajak.

Namun, walaupun Kompas.com telah netral, dapat terlihat dari narasi narasinya bahwa pada dasarnya Kompas.com berpihak dan peduli kepada kepentingan Masyarakat

dengan cukup banyaknya berita mengenai dampak yang ditimbulkan dari kenaikan PPN jadi 12 persen dan pemberitaan mengenai perbandingan nilai pajak di Indonesia dan di negara lain.

Hasil analisis framing dengan pendekatan analisis framing dari Robert Entman menunjukkan ada empat elemen pemberitaan terkait kenaikan PPN 12 persen yaitu.

1. Define problem

Bagaimana Kompas.com membingkai beritanya dengan menekankan pada aspek masalah terkait kenaikan PPN 12 persen. Dimana Kompas.com memberitakan secara lengkap dampak yang akan dihadapi oleh Masyarakat Ketika PPN 12 persen diberlakukan yaitu naiknya harga barang dan jasa sehingga terjadi inflasi yang membuat daya beli Masyarakat semakin melemah. Pada dasarnya dampak dari daya beli Masyarakat melemah akan berpengaruh pada perekonomian pada umumnya di Indonesia.

2. Diagnose cause

Bagaimana Kompas.com membingkai beritanya dengan menekankan pada aspek penyebab naiknya PPN 12 persen. Dimana Kompas.com dalam pemberitaannya mengungkapkan bahwa naiknya PPN menjadi 12 persen dikarenakan untuk menjaga Kesehatan APBN demi mengantisipasi ketidakpastian ekonomi dan masalah geopolitical global.

3. Make moral judgement

Bagaimana Kompas.com membingkai beritanya dengan menekankan pada aspek pertimbangan moral apa yang diambil oleh Kompas.com terkait isu kenaikan PPN 12 persen. Dimana terlihat dari pemberitaan Kompas.com pertimbangan moral lebih berpihak pada Masyarakat namun tidak menghilangkan nilai netralitasnya dengan menyajikan berita dari berbagai macam sumber. Baik yang bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah.

Pertimbangan moral Kompas.com tersebut dengan menyajikan berita tentang perbandingan nilai tarif pajak antar negara dengan Indonesia dan bagaimana negara

tersebut memanfaatkan dan mengelola pajaknya. Selain itu Kompas.com juga menyajikan berita yang memuat opini yang memihak pada Masyarakat dari berbagai sumber mulai dari ekonom, pengusaha, buruh, akademisi dan generasi milenial sehingga dapat membuka wawasan Masyarakat dan mempengaruhi opini mereka terkait isu kenaikan PPN 12 persen.

4. Treatment recommendations

Bagaimana Kompas.com membingkai beritanya dengan menekankan pada aspek rekomendasi Solusi yang ditawarkan oleh berbagai pihak baik dari pihak pemerintah maupun rekomendasi dari luar pemerintah. Namun dapat terlihat bahwa Kompas.com menekankan rekomendasi Solusi dari sumber lain diluar pemerintah. Hal ini terlihat dari banyaknya berita yang dimunculkan terkait Solusi dari kenaikan PPN dari ekonom, akademisi, partai politik dll.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis ucapkan pada civitas akademika Universitas Hasanuddin terumata pengajar, teman yang memberikan penulis motivasi dan ide untuk menulis penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Baker, E. (2006). Media Concentration and Democracy: Why Ownership Matters. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511810992>.
- Bagdikian, B. H. (2014). The new media monopoly: A completely revised and updated edition with seven new chapters. Beacon press.
- Entman, R. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. Journal of Communications. <https://doi.org/10.1111/J.1460-2466.1993.TB01304.X>.
- Gamson, W., & Modigliani, A. (1989). Media Discourse and Public Opinion on Nuclear Power: A Constructionist Approach. American Journal of Sociology, 95, 1 - 37. <https://doi.org/10.1086/229213>.
- Guo, L., & Vargo, C. (2017). Global Intermedia Agenda Setting: A Big Data Analysis of International News Flow. Journal of Communication, 67, 499-520. <https://doi.org/10.1111/JCOM.12311>.

- Herman, E. S., & Chomsky, N. (2021). Manufacturing consent. In *Power and Inequality* (pp. 198-206). Routledge.
- Happer, C., & Philo, G. (2013). The Role of the Media in the Construction of Public Belief and Social Change. *Journal of Social and Political Psychology*, 1, 321-336. <https://doi.org/10.5964/JSPP.V1I1.96>.
- McCombs, M. (1972). Agenda setting function of mass media. *Public Relations Review*, 3, 89-95. [https://doi.org/10.1016/S0363-8111\(77\)80008-8](https://doi.org/10.1016/S0363-8111(77)80008-8).
- McChesney, R. (2000). Rich media, poor democracy : communication politics in dubious times. . <https://doi.org/10.5860/choice.38-0115>.
- Moretti, A. (2010). Media and Political Engagement: Citizens, Communication, and Democracy. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 87, 436. <https://doi.org/10.5860/choice.47-1695>.
- Sen, K., & Hill, D. (2000). Media, culture and politics in Indonesia. .
- Soroka, S. N. (2002). Issue attributes and agenda-setting by media, the public, and policymakers in Canada. *International Journal of Public Opinion Research*, 14(3), 264-285.
- Sparrow, B. (2004). Projections of Power: Framing News, Public Opinion, and U.S. Foreign Policy. *Perspectives on Politics*, 2, 839 - 840. <https://doi.org/10.1017/S1537592704350589>.